

## **PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA MALAYSIA DI SAMBAS**

Wulan Purnamasari

Muslimin H. Kara

Mohd. Sabri, AR

Amiruddin, K

Institut Agama Islam Sultan Syaifuddin Sambas

[wulan-sarwawibawa@yahoo.com](mailto:wulan-sarwawibawa@yahoo.com)

**Abstrak:** Tulisan ini mengurai tentang perkembangan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). pengumpulan data secara detail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang berkelanjutan. Adapun jenis studi yang dipakai yakni studi mengenai model pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas perspektif ekonomi Islam. Untuk melihat strategi pengembangan kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas, dalam penelitian ini dilakukan analisis mendalam terhadap kinerja Bagian Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Kemudian akan dikembangkan kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pengamatan selanjutnya. Sumber data primer adalah pihak expert/ ahli atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis ekonomi Kabupaten Sambas menunjukkkn bahwa pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Sambas yang sedemikian pesatnya hakikatnya belum mampu mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tipologi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas adalah merupakan daerah relatif tertinggal (low growth and low income), yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, dengan rata-rata kontribusi sektoral hanya 5,37 persen. Adapun yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan salah satu sektor berkembang yang harus diperhatikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

**Keywords:** *Ekonomi Kawasan Perbatasan, Indonesia-Malaysia, Sambas*

### **I. PENDAHULUAN**

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kawasan perbatasan ini secara geografis berada pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 km. Secara kewilayahan ada 5 (lima) kabupaten dan 14 (empat belas) kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Adapun kabupaten dan kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Kabupaten-kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Malaysia

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Kabupaten Sambas	1. Paloh 2. Sajingan Besar
2.	Kabupaten Bengkayang	1. Jagoi Babang 2. Siding
3.	Kabupaten Sanggau	1. Entikong 2. Sekayam
4.	Kabupaten Sintang	1. Ketungau Hulu 2. Ketungau Tengah
5.	Kabupaten Kapuas Hulu	1. Badau 2. Puring Kencana 3. Putussibau Utara 4. Putussibau Selatan 5. Embaloh Hulu 6. Batang Lupar

Sumber: BPKPK, 2013

Sebagai wilayah terdepan negara, pengembangan kawasan perbatasan mendapatkan perhatian khusus oleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini karena wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan.<sup>1</sup> Cara pandang kawasan perbatasan yang dulunya berorientasi ‘inward looking’ menjadi “outward looking” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Perubahan paradigma ini membuat citra kawasan perbatasan negara dari yang dulunya merupakan kawasan yang senantiasa tertinggal dan terisolir. Kawasan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju, atau dengan kata lain kawasan perbatasan terdepan yang dilupakan. Menjadi kawasan perbatasan negara yang berorientasi outward looking atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga<sup>2</sup>.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan tersebut, berbagai produk perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan negara diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional dengan memperhatikan kawasan perbatasan adalah beranda depan negara; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang

---

<sup>1</sup>Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk: (a) mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/ Kotamadya daerah tingkat II; (b) meningkatnya fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya;(c) mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Republik Indonesia. Undang Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang: Penataan ruang, Pasal 10 ayat 3.

<sup>2</sup>Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia . Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 (Jakarta: BNPP,2011), h. 24.

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025. Undang-undang tersebut mengupayakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menetapkan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), melalui pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah perbatasan negara. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai serambi depan negara, yang berorientasi *outward looking* atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Mengemban visi untuk mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.

Selain undang-undang tersebut terdapat agenda pembangunan (Nawa Cita) pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, menegaskan bahwa pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata serta terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yang terangkum dalam Nawa Cita 3, Nawa Cita 6 dan Nawa Cita 7:

- a) Nawa Cita 3 mengagendakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.
- b) Nawa Cita 6 mengagendakan peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- c) Nawa Cita 7 mengagendakan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia yaitu sepanjang 97 km. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Kabupaten Sambas mempunyai posisi dan peran yang strategis terutama dalam pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara.

Berbagai upaya percepatan pembangunan telah dilakukan. Namun usaha untuk menjadikan wilayah perbatasan negara diantaranya Wilayah Perbatasan Negara Kabupaten Sambas sebagai wilayah terdepan negara bukanlah hal yang mudah. Karena dalam prosesnya membutuhkan investasi, alokasi anggaran yang besar, serta diperlukan komitmen nasional dalam upaya pengembangannya.

Secara umum wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas kurang didukung fasilitas sosial ekonomi, sehingga menjadikan masyarakat perbatasan berorientasi ekonomi ke Serawak, baik dalam orientasi aliran orang maupun barang. Sehingga secara keseluruhan Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sambas menjadi hinterland wilayah Serawak Malaysia<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025*, h. 31.

<sup>4</sup>Husnadi, "Menuju Model Pengembangan kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten sambas, Kalimantan Barat)" Tesis (Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 2006), h. 207-209.

Selain itu Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Biawak Negara Bagian Sarawak Malaysia, sangat rawan akan perdagangan barang dan perlintasan orang secara ilegal.<sup>5</sup> Permasalahan yang sama juga terjadi di perbatasan negara Entikong Kalimantan Barat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan negara Kalimantan Barat selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara tetangga dan ketertinggalan yang dihadapi, yaitu terjadinya kemajuan ekonomi Malaysia di satu pihak dan kemerosotan ekonomi Indonesia lain pihak.<sup>6</sup>

Walaupun salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, telah dijadikan sebagai Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Komersial Zone Aruk ternyata belum mampu meningkatkan perekonomian kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan kawasan perbatasan negara serta lokasi pengembangan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk tersebut, secara spasial masuk ke dalam klasifikasi low growth and low income. Keseluruhan kawasan ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas<sup>7</sup>.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas, jika dilihat melalui angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam rentang waktu 5 tahun, tahun 2011-2015 peranan perekonomian Kabupaten Sambas terhadap perekonomian Kalimantan Barat secara umum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, namun persentase kenaikan sangat kecil, hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.2. Kabupaten Sambas hanya menyumbang kontribusi PDRB rata-rata pertahun sebesar 9,97 persen dalam mengembangkan perekonomian Kalimantan Barat.

Tulisan ini mengurai tentang perkembangan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas. Untuk membantu proses analisis ekonomi Kabupaten Sambas, diantaranya untuk mengetahui tipologi daerah Kabupaten Sambas digunakan alat analisis tipologi daerah. Tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

## **II. KAJIAN TEORETIK**

### **A. Konsep Kawasan Perbatasan**

Perbatasan pada awalnya adalah konsep geografis-spasial, perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan juga merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertempuran untuk memperluas

---

<sup>5</sup>Zaenuddin Hudi Prasajo. "Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan", *Walisongo* 21, no. 2 (2013): h. 419.

<sup>6</sup>Dedi Kurniadi. "Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikon Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat". Tesis. (Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro., 2009), h. 67.

<sup>7</sup>Wulan Purnamasari, "Analisis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Studi: Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk)" Tesis (Yogyakarta: Proqram Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu-Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2014), h. 102.

batas-batas antarnegara. Tirtosudarmo<sup>8</sup> menjelaskan bahwa perbatasan negara atau state's border dikenal bersamaan dengan lahirnya sebuah negara.

Lahirnya konsep negara-bangsa (nation-state) menunjukkan kompleksitas tersendiri yang menunjukkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnis yang berbeda, akan tetapi juga membelah etnis yang sama disebabkan dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama. Oleh karena itu, cakupan perbatasan meliputi hak-hak tradisional, hak dan kewajiban internasional di perbatasan, hubungan hukum nasional dan internasional, masalah demografi, sifat-sifat alam, daerah perbatasan dan kedudukan batas artifisial. Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi:

- a) mengelola dan mengawasi territorial status quo;
- b) mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya.
- c) Menurut LIPI (2007), wilayah perbatasan adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan tapal batas wilayah negara tetangga (darat, laut, pantai dan pulau). Saat ini semakin dapat dirasakan bahwa perkembangan suatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh daerah sekitarnya mulai dari daerah tetangga sampai daerah yang lebih jauh jaraknya bahkan pengaruh dari bagian bumi lainnya. Dampak globalisasi telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, wilayah sebagai sistem spasial dalam lingkup kegiatan pengembangan wilayah merupakan subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Sebuah kabupaten/kota, dalam kegiatan pengembangan wilayah, di samping menganalisis data spasial kabupaten/kota yang bersangkutan, juga perlu memperhatikan paling tidak bagaimana perkembangan daerah sekitarnya (interregional planning). Sebuah kabupaten/kota tidak dapat hidup sendiri dan oleh karena itu perlu mengadakan kerja sama dengan daerah tetangganya.
- d) Arah kebijakan pembangunan pemerintah pada tahun 2007 pada dasarnya adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah khususnya pada wilayah perbatasan dan terisolir, adapun kebijakan tersebut adalah: 1) Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar, dengan fokus pada: Penegasan dan penataan batas negara di darat dan di laut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terluar; peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara tetangga; penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; dan pemihakan kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. 2) Percepatan pembangunan wilayah terisolir, dengan fokus pada: pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah terisolir; dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah terisolir.
- e) Pada umumnya wilayah perbatasan secara umum memiliki prospek yang sangat besar dalam pengembangan potensi sosial ekonomi rakyat, sebab melalui wilayah perbatasan akan terjadi interaksi diantara masyarakat dalam melakukan hubungan timbal balik guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, serta kerjasama dalam lingkungan sosial.

---

<sup>8</sup>Riwanto Tirtosudarmo, "Kalimantan Barat sebagai 'Daerah Perbatasan': Sebuah Tinjauan Demografi-Politik". Antopologi Indonesia no. 67 (2008): h.9

Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo dalam Kurniadi<sup>9</sup>, batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

1. Natural border, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik;
2. Artificial border, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas kultural/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).

Secara spesifik wilayah perbatasan itu menjadi eksis apabila unit politik (pemerintahan antarkedua wilayah) terbentuk. Batas tersebut membagi dua sistem otoritas politik, di mana fungsi perbatasan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Fungsi Kawasan Perbatasan

Guo	Van Well
1. Sebagai fungsi legal, di mana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara.	1. Sebagai barrier/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi.
2. Sebagai fungsi kontrol di mana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah.	2. Sebagai jembatan, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas.
3. Sebagai fungsi fiskal, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.	3. Batas sumber daya (resources), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah.
	4. Sebagai simbol identitas, lambang identitas suatu negara.

Sumber: Kurniadi (2009: h, 32)

Sementara itu masing-masing wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tipologi kawasan yang berbeda-beda. Karakteristik kawasan perbatasan dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu karakteristik fisik, karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, karakteristik penduduk, karakteristik ekonomi, karakteristik sumber daya alam, karakteristik pertahanan, dan karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Untuk memahami pengelolaan wilayah perbatasan negara secara utuh, diperlukan pemahaman mengenai perbatasan negara. Wilayah perbatasan negara dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu perbatasan darat, laut dan udara. Berikut ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing bentuk perbatasan.

- a. Perbatasan darat. Perbatasan darat adalah tempat kedudukan titik-titik atau garis-garis batas yang memisahkan daratan atau bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya bahwa garis batas tersebut mengikat kedua belah pihak pada sebelah menyebelah perbatasan tersebut. Jadi apabila terjadi perubahan pada satu pihak,

<sup>9</sup>Dendi, Kurniadi, "Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan antar negara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat". Tesis (Semarang: Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, 2009). h. 86.

akan menimbulkan perubahan pada pihak lain, demikian pula hak-haknya (hak bersama/res communis). Unsur terpenting dari perbatasan adalah tempat kedudukan dari perbatasan tersebut, yaitu harus jelas, tegas dan dapat diukur. Perbatasan pada umumnya adalah dua dimensional, dalam arti bahwa yang dibatasi bukan hanya keadaan topografi di atas permukaan tetapi perbatasan itu sendiri juga membagi tanah dan kerak bumi di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Karena perbatasan banyak menimbulkan persoalan-persoalan administratif antara kedua negara, maka pada umumnya bagian perbatasan di permukaan tanah diberi lagi jalur-jalur perbatasan yang lain (zona) pada sebelah menyebelah perbatasan yang mempunyai jarak tertentu dari perbatasan sesungguhnya. Zona ini kadang-kadang disebut dengan Free Zone, atau Safety Zone, Demilitarry Zone, no man's land dan seterusnya, yang masing-masing istilah sesuai dengan tekanan fungsinya. Akan tetapi dengan adanya zona bebas ini tidak berarti bahwa kedudukan perbatasan yang sebenarnya itu berubah. Dalam menentukan batas negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara alamiah dan artifisial (buatan). Penetapan batas secara alamiah dilakukan dengan mengikuti kontur alam di daerah perbatasan, seperti misalnya aliran sungai dan pegunungan. Penetapan secara artifisial dapat dilakukan dengan mendirikan atau membangun pagar pemisah/patok batas negara di sepanjang titik-titik perbatasan yang disepakati oleh negara-negara yang berbatasan.

- b. Perbatasan laut. Perbatasan laut merupakan tempat kedudukan titik-titik koordinat atau garis-garis batas yang memisahkan perairan (laut) ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Batas wilayah laut teritorial suatu negara sudah diatur melalui pranata-pranata hukum laut yang telah disepakati secara internasional, seperti laut teritorial, perairan pedalaman, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Pranata-pranata hukum tersebut diperoleh berdasarkan konvensi-konvensi mengenai hukum laut yang dilakukan secara internasional.
- c. Perbatasan udara. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Batas wilayah udara suatu negara terletak di batas terluar dari laut teritorialnya. Dengan demikian mencakup udara di atas wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sementara itu, mengenai batas luar dari ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara, hingga saat ini belum ada kesepakatan secara internasional.

## **B. Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

Pengelolaan secara umum adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Pengelolaan kawasan perbatasan dimaknai sebagai kegiatan manajemen penanganan (bagaimana menangani) perbatasan, atau secara rinci sebagai upaya bagaimana menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi

pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Sejak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (Propenas) periode 2000-2004 kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah, dimana pembangunan daerah-daerah perbatasan menjadi agenda meningkatkan pembangunan daerah, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Salah satu tujuan dari agenda ini adalah meningkatkan pengembangan dan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perbatasan dan perkotaan, pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pemukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertahanan juga mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Propenas juga secara khusus telah merumuskan “Program Pengembangan Daerah Perbatasan” yang berbasis kewilayahan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasaran dari program ini adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, serta terciptanya ketertiban dan keamanan perbatasan.

Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan terkait juga dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, yang antara lain.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025.
2. PP Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
3. PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
6. Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
7. PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Perundang-undangan tersebut, memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward looking, sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sebagai perwujudan dari pergeseran paradigma tersebut, dari sisi penataan spasial nasional, kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun kriteria penetapan PKSN sebagai Pusat Kota Kawasan Perbatasan menurut PP No 6 Tahun 2008 adalah:

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan dengan negara tetangga;

---

<sup>10</sup>Dendi, Kurniadi, “Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan antar negara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”, h. 47.



2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan atau;
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Pada dasarnya konsep pembangunan PKSNN terdiri dari pengembangan pusat-pusat pelayanan, pengembangan jaringan infrastruktur khususnya jaringan jalan serta rencana pemanfaatan ruang. Pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan juga mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).

1. Pendekatan kesejahteraan. Pada pendekatan kesejahteraan usaha yang dilakukan berdasarkan pada pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
2. Pendekatan keamanan. Pada pendekatan keamanan kawasan perbatasan dipandang sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga diperlukan pengawasan terhadap kawasan perbatasan tersebut guna keutuhan NKRI. Dalam pendekatan ini kawasan perbatasan dilihat sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan keamanan negara termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Pendekatan lingkungan. Pada pendekatan lingkungan, aspek lingkungan merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Pendekatan ini mengacu pada rencana pusat pengembangan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Dengan rencana ini maka pusat pengembangan kawasan akan berada di kawasan gerbang perbatasan atau pada jaringan jalan utama menuju gerbang perbatasan.

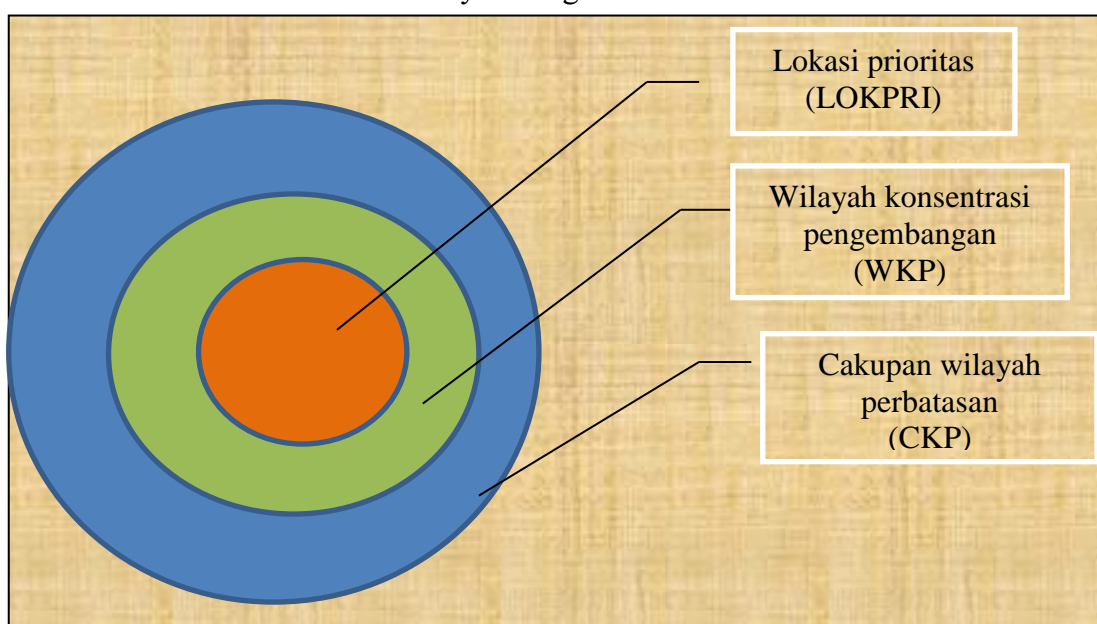
Menyikapi hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dibentuklah badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Mandat BNPP sebagai lembaga pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini terefleksi dari tugas pokok dan fungsi BNPP yang difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu menetapkan kebijakan program, menetapkan kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara kawasan perbatasan. Adapun tujuan utama pengelolaan perbatasan oleh BNPP yaitu:

1. Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi;
2. Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Secara garis besar pengelolaan kawasan perbatasan memiliki ruang lingkup penanganan yang mencakup dua sasaran strategis yaitu pengelolaan batas wilayah antarnegara dan pengelolaan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan darat maupun laut Indonesia dengan negara-negara tetangga mempunyai permasalahan berbeda-beda karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik sendiri.

Adapun model pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah (problem and area focus). Pengelolaan dengan model tersebut akan dipermudah dengan telah ditetapkannya dari awal mengenai lokasi prioritas (lokpri) di mana berbagai input pembangunan dari sektor terkait akan digiring masuk ke lokasi-lokasi prioritas secara terpadu sesuai kebutuhan kawasan, termasuk sektor swasta yang memungkinkan. Input sektoral yang dimaksudkan di sini, mencakup program dan perangkat pendukungnya yang antara lain kegiatan, anggaran, tenaga, peralatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Gambar 2.3  
Sasaran Wilayah Pengelolaan Kawasan Perbatasan



Sumber: BNPP, (2011)

Mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, beberapa kegiatan program hanya akan digiring masuk hanya sampai ke Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) sebagai sasaran antara, namun diperhitungkan mempunyai efek mendukung aktivitas lain yang dibutuhkan di lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan, antara lokasi prioritas, WKP, dan cakupan kawasan perbatasan adalah sub-sub sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Koordinasi berbasis wilayah, melihat keterkaitan lokasi ini lebih pada hubungan langsung dan tak langsung dalam sebuah sistem pembangunan yang sasaran utamanya adalah lokasi prioritas pengembangan yang ada di WKP.

### C. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.<sup>11</sup> Dalam setiap negara terdapat tiga komponen

<sup>11</sup>Tarigan, R. *Ekonomi Regional*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.50.

utama pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia; pertumbuhan penduduk yang dapat menambah jumlah angkatan kerja; kemajuan teknologi yang dapat melancarkan serta memudahkan dalam kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat diwujudkan jika pertumbuhan PDRB riil melebihi laju pertumbuhan penduduk. Sebelumnya pertumbuhan PDRB dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai, yang dinyatakan dalam harga konstan. Artinya jika laju pertumbuhan penduduk konstan, maka laju pertumbuhan PDRB riil akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh dan Kuncoro<sup>12</sup> dikenal lima pendekatan utama dalam teori pembangunan ekonomi wilayah yaitu: teori pertumbuhan linear (linear stages of growth); teori pertumbuhan struktural; teori revolusi ketergantungan internasional (dependensia); teori neoklasik; teori-teori “baru”.

1. Teori pertumbuhan linear. Sejak pertama kali ditemukan oleh Adam Smith yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok-tanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Teori tersebut mengalami puncak kejayaan dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow. Teori-teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Adam Smith, Karl Marx dan Rostow termasuk dalam model pertumbuhan linear. Dasar pemikiran dari model ini adalah proses pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut mutlak harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun, di mana tahap-tahap pembangunan tersebut harus dilalui satu-persatu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi.
2. Teori pertumbuhan struktural. Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara berkembang. Awalnya lebih bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor pertanian ke struktur perekonomian yang didominasi sektor industri dan jasa. Hipotesis utama dari teori ini adalah menjelaskan bahwa model perubahan struktural yang terjadi pada tiap-tiap negara sebenarnya dapat diidentifikasi dan proses perubahan secara umum dari masing-masing negara pada umumnya memiliki kesamaan pola. Teori ini juga menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi struktural yang terjadi pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
3. Teori dependensia. Teori dependensia berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang. Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama adalah perekonomian negara maju dan yang kedua adalah perekonomian negara-negara berkembang. Ekonom penganut teori ini berasumsi sektor modern di negara miskin tak lebih dari sektor satelit yang tidak dapat berkembang sendiri dan sangat tergantung pada kondisi perekonomian negara

---

<sup>12</sup>Mudrajat Kuncoro. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPPT STIM YKPN, 2010), h. 31.

- maju.
4. Teori neo-klasik. Teori neo-klasik muncul pada dekade 1980-an. Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran swasta dalam pembangunan. Ekonom penganut teori ini menyatakan bahwa semakin besar campur tangan pemerintah, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara.
  5. Teori-teori “baru”. Terdapat setidaknya tiga teori baru yang muncul, yaitu: teori pertumbuhan baru (New Growth Theori), teori geografi ekonomi baru (New Economic Geography) dan teori perdagangan baru (New Trade Theory, ). New Growth Theori dikemukakan oleh ekonom yang mengkritik teori neo-klasik dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kemunculan New Economic Geography dan New Trade Theory disebabkan oleh belum mampunya para ilmuwan dan ekonom memberikan penjelasan tentang “mengapa” dan “di mana” aktivitas ekonomi berlokasi.

#### **D. Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak mulai dicanangkannya upaya meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah pada 1999-2004, serta dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking. Wilayah perbatasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal ini berimbang pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan. Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini tersus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Sementara dalam pandangan Depkimpraswil bahwa “pengembangan wilayah perbatasan dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.”

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (dinyatakan bahwa “Program pengembangan wilayah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan. Adapun Komponen-komponen program prioritasnya antara lain : (1) Pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan ; (2) Peningkatan

pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi ; (3) Peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas ; (4) Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan ; (5) Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan daerah perbatasan.” Karena “hakikat perbatasan sebagai batas-batas luar negara yang mana batas wilayah adalah daerah-daerah pengganti negara”, dimana “ekonomi dan kehidupan sosialnya adalah langsung dan berhubungan, karena dipengaruhi oleh dekatnya kepada sebuah perbatasan internasional. Dalam wilayah perbatasan akan terjadi perdagangan terbuka yang dampaknya memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena tersedianya barang-barang dan investasi yang melintasi perbatasan melalui perdagangan internasional.

Usaha mengoptimalkan pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan cara mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan sesuai potensi setempat, meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi, meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi, membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar Negara, menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua Negara, meningkatkan mutu pelayanan dan sarana kepabeanan dan imigrasi, membangun pola insentif dan disinsentif, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mempertegas patok-patok perbatasan wilayah negara dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dan meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan kawasan perbatasan. Adapun strategi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengurangan ketimpangan dengan percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas wilayah dan perasarana publik diperbatasan, menyelenggarakan kerjasama luar negeri dibidang perdagangan, ekonomi dan investasi diperbatasan, menegakkan hukum dan keamanan perbatasan, menyelenggarakan penataan kelembagaan dan kewenangan diperbatasan secara efektif.

Disamping itu, melalui pengembangan wilayah perbatasan, menurut Komisi Eropa, perlunya suatu kerjasama yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, pengakuan dan transparansi dalam struktur penggunaan dana, komitmen yang lebih baik, merasa memiliki, pemanfaatan hasil program, dari kerjasama yang dibangun. Sehingga akan dapat memberikan kontribusi positif yang lebih baik dalam diimplementasikan dari kerjasama yang dibangun. Disamping itu cakupan dari kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan pada masa yang akan datang, seperti memperbaiki kemampuan masing-masing institusi yang memiliki tingkat perbedaan, persoalan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi, serta melakukan sebuah perbaikan yang meliputi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Perbatasan**

Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 (tiga) yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu...". Amanat tersebut dipertegas dalam Bab XIV pasal 33 ayat 1 "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Sejalan dengan amanat UUD 1945 di atas, maka pemerintah menetapkan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 meliputi 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya sebagai berikut: 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin; 2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi; 3) Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 4) Memperbaiki mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; serta 5) Membaiknya infrastruktur dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan.

Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat melalui pembangunan sosial ekonomi, membutuhkan suatu konsep, perencanaan, strategi dan kebijakan yang tersusun secara sistematis. Beberapa tahun terakhir, pembangunan sosial ekonomi masyarakat telah disusun beberapa konsep yang diharapkan dapat memecahkan berbagai problematika dalam perbedaan tingkat kesejahteraan diantara masyarakat. Adanya konsep pembangunan ekonomi alternatif, konsep modernisasi dan pembangunan, konsep pembangunan wilayah perbatasan, merupakan beberapa usaha yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Khusus pembangunan wilayah perbatasan, dewasa telah dijadikan sebagai alternatif bagi usaha menyelesaikan permasalahan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Sebab pada umumnya di wilayah perbatasan tingkat perbedaan kesejahteraan masyarakat sangat tinggi. Sehingga diperlukan konsep pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Disamping itu dalam rangka pencapaian sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan arah kebijakan sebagai berikut : Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

#### **F. Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

Hingga saat ini pengelolaan perbatasan di Indonesia masih dihadapkan pada dua isu strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu isu pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan.

- a) Pengelolaan batas wilayah negara. Permasalahan pengelolaan batas wilayah negara secara umum adalah belum selesainya penetapan dan penegakan beberapa segmen batas wilayah negara dengan negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut,

sehingga sering menjadi penyebab munculnya masalah terkait sengketa garis batas yang potensial mengancam kedaulatan RI. Menurut BNPP dalam Grand Design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2025 gambaran umum permasalahan batas darat negara dengan tiga negara tetangga adalah.

(1) Perbatasan darat NKRI

- (a) Batas darat RI-Malaysia. Penyelesaian batas kedua negara melalui perundingan masih banyak mengalami permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) sebanyak 9 kasus. Kegiatan survei Investigarion, Refixation, Maintenance (IRM) pihak Indonesia masih memiliki kekurangan kelengkapan data, ketersediaan dana survei dan aksesibilitas. Kegiatan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) baru menghasilkan buku ukur yang diperlukan untuk data Comp Sheet.
  - (b) Batas darat RI-PNG. Penyelesaian batas kedua negara ini melalui perundingan masih menyisakan beberapa permasalahan. Sumber hukum RI-PNG adalah Treaty 1973 dan telah disahkan dengan UU No. 6/1973, saat Treaty ditandatangani, terdapat 14 MM. Deklarasi-deklarasi pilar-pilar batas telah ditandatangani ditingkat teknis namun belum ada perundangan ditingkat nasional. Pilar batas telah disepakati dan ditegaskan 52 MM dan telah dipasang 1792 pilar peratapan.
  - (c) Batas darat RI-RDTL. Penyelesaian batas kedua negara ini masih menyisakan beberapa permasalahan di lapangan. Terdapat tiga un-resolved segmen; Noel Besi, Manusasi, dan Memo, satu un-surveyed segmen (Subina-Oben), dan satu segmen kecil di Nelu (TTU,  $\pm 1,5$  km) yang sudah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakatnya menolak didemarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan garapan. Kondisi saat ini pada wilayah Noel Besi terdapat 44 keluarga Timor Leste, Keluarga RDTL yang seharusnya tidak berada pada wilayah tersebut (Desa Naktuka). Masalah lain terkait Border Crossing Pass yang tidak seragam dan berisi informasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kedua negara. Gambaran permasalahan perbatasan tersebut, masih dilengkapi dengan persoalan lain adanya pergeseran, kerusakan, dan hilangnya patok-patok perbatasan darat wilayah negara, banyaknya jalur tikus lintas batas, dan kondisi Pos Lintas Batas (PLB) yang belum memadai terutama PLB tradisional, secara akumulatif menjadi bagian dari permasalahan strategis perbatasan saat ini yang memerlukan perhatian serius.
- (2) Perbatasan laut NKRI. Permasalahan perbatasan laut di Indonesia adalah sejumlah segmen batas wilayah laut, baik batas dengan negara tetangga maupun batas-batas terluar yurisdiksi negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk pemanfaatannya, banyak yang belum disepakati. Untuk Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dari sebanyak 10 perjanjian, baru 2 yang telah disepakati dan 8 belum ada kesepakatan. Untuk Batas Laut Teritorial (BLT), dari sebanyak 5 perjanjian, telah ada sebanyak 3 yang telah disepakati dan menyisakan 2 yang belum. Untuk batas laut kontinen (BLK), dari sebanyak 8 perjanjian, telah 4 disepakati dan 4 lagi yang belum ada kesepakatannya. Masih lemahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas ilegal (illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dll) serta gangguan keamanan di kawasan perbatasan. Masih rendahnya aksesibilitas informasi yang berpotensi melemahkan wawasan maupun rasa kebangsaan warga bangsa di perbatasan.

Permasalahan umum yang terjadi hampir di semua wilayah kawasan perbatasan di Indonesia adalah belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan tertinggal serta terisolasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan akses yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Rendahnya kualitas SDM, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya, menambah kompleksitas permasalahan aktual yang dapat ditemui di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan yang bersifat makro. Sementara itu rencana rinci RTRWN berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan masih belum tersedia, sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya. Dalam pengembangannya, masih banyak potensi kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan, namun banyak pula upaya yang harus dilakukan. Selama ini, banyak yang belum tergarap secara optimal untuk kesejahteraan rakyat di perbatasan maupun kemajuan bangsa dan Negara Indonesia. Adapun 4 permasalahan strategis dalam penguatan pengolaan perbatasan adalah.

- a. Masih belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang secara sektoral menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- b. Masih belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruh sektor dan keterbatasan keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan.
- c. Masih belum adanya koordinasi pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan, bahkan banyak yang kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi, pembangunan gedung atau pasar, tak ada listrik dan sarana transportasinya, sehingga kurang fungsional, bahkan dibiarkan kosong.
- d. Masih belum adanya pola evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara, sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan secara komprehensif, akibatnya menyulitkan mengambil penanganan yang efektif atas situasi dan kondisi.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). pengumpulan data secara detail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang berkelanjutan. Adapun jenis studi yang dipakai yakni studi mengenai model pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas perspektif ekonomi Islam. Untuk melihat strategi pengembangan kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas, dalam penelitian ini dilakukan analisis mendalam terhadap kinerja Bagian Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Kemudian akan dikembangkan kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pengamatan selanjutnya. Sumber data primer adalah



pihak expert/ ahli atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas**

Secara umum hingga saat ini pengelolaan perbatasan di Kabupaten Sambas dihadapkan dengan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis pembangunan wilayah perbatasan negara di Sambas berdasarkan kebijakan program percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas adalah<sup>13</sup>:

- a. Kawasan perbatasan adalah daerah yang memiliki batas-batas administrasi dan teritorial negara. Suatu kawasan bagi berlakunya hukum-hukum internasional, berkaitan dengan keimigrasian dan kepabeanan.
- b. Merupakan pencerminan atau barometer pembangunan nasional dan daerah, yang berarti meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Dengan kata lain, wilayah perbatasan merupakan berada negara.
- c. Kesenjangan atau perbedaan tingkat ekonomi masyarakat yang mencolok, sehingga menyebabkan adanya potensi daya tarik atau ketergantungan ekonomi yang lebih besar ke negara tetangga (dalam hal ini negara bagian Sarawak, Malaysia)
- d. Hubungan ekonomi masyarakat kedua negara telah menafikan atau kurang memperhatikan batas-batas negara.
- e. Merupakan daerah rawan berlangsungnya kegiatan-kegiatan illegal (illegal logging, illegal labour, pencurian dan penyeludupan), dikarenakan lemahnya pembinaan dan pengendalian teritorial, sehingga pemanfaatan sumber daya dan lahan dapat dilakukan oleh kedua masyarakat negara tanpa memperhatikan batas-batas negara.
- f. Secara umum, wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas merupakan kawasan yang strategis, bahkan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan RI. Strategis, karena secara geografis kawasan wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar, karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Vital, karena secara geografis politik wilayah perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial budaya, ekonomi dan politik.

Sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dalam pengembangan wilayah Perbatasan adalah agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat di perbatasan Indonesia. sebagai beranda terdepan negara dapat terwujud, serta berusaha memperbaiki taraf kehidupan masyarakat perbatasan dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Kabupaten Sambas secara sosial dan ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Interaksi sosial dan ekonomi kedua masyarakat perbatasan memberikan peluang berkembangnya Kabupaten Sambas pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara. Penilaian ini didasarkan pada kehidupan masyarakat di kedua wilayah dengan fakta masyarakat di Kabupaten Sambas dan Serawak sering melakukan kegiatan sosial secara bersama, seperti acara kegiatan adat, lomba sampan, perkawinan, keagamaan dan sebagainya. Sedangkan

---

<sup>13</sup>Pemerintah Kabupaten Sambas, Kebijakan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas. (Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas, 2016), h. 3

dalam kegiatan ekonomi, masyarakat Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Sajingan dan Paloh sering melakukan aktivitas perdagangan (jual beli) dengan masyarakat di Biawak (Distrik Lundu) seperti jual beli hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, kerajinan tangan, gas, kebutuhan pokok dan lain-lain. Disamping itu juga terjadi arus lintas batas para pencari kerja dari wilayah Kecamatan Sajingan ke Serawak.

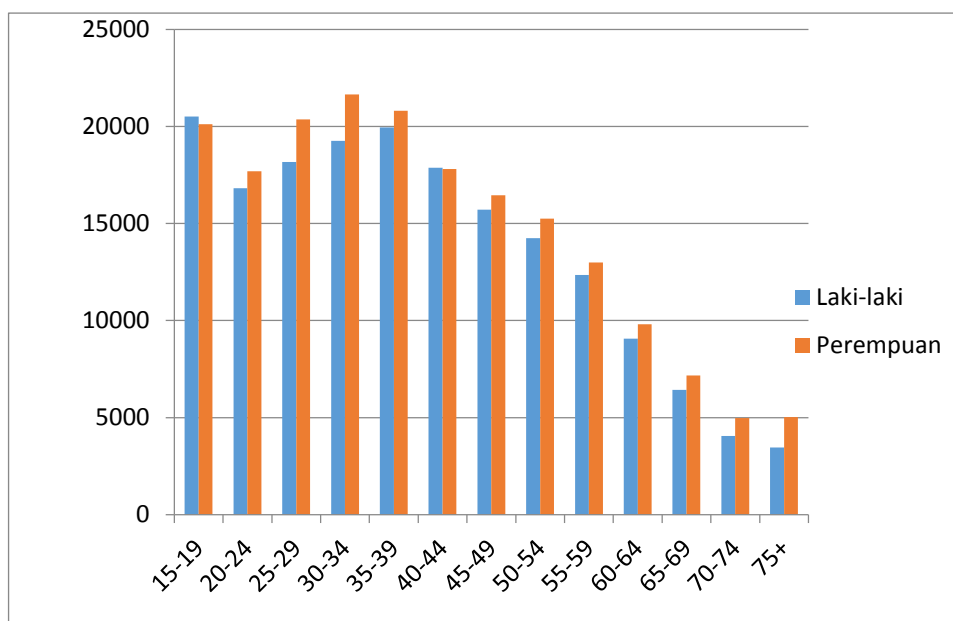
## 2. Analisis Ekonomi Kabupaten Sambas

### a) Analisis Spasial Kabupaten Sambas

#### (1) Kependudukan

Analisis spasial pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas sangat diperlukan untuk mengetahui aktivitas penduduk dalam sebuah ruang. Berdasarkan penelitian lapangan pengelompokkan masyarakat terjadi di sepanjang jalur jalan. Berdasarkan data penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain.

Penduduk Kabupaten Sambas menurut data BPS pada tahun 2017 berjumlah 529.684, dengan kepadatan penduduk sekitar 83 jiwa/km<sup>2</sup>. Total penduduk laki-laki di Kabupaten Sambas berjumlah 260.502 jiwa, sedangkan total penduduk perempuan berjumlah 269.182 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk terjadi perbedaan yang sangat signifikan, Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 420 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Sajingan Besar dengan luas sekitar 21,75 persen dari total wilayah Kabupaten Sambas hanya dihuni 8 jiwa/km<sup>2</sup>.



Untuk usia produktif berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas termasuk dalam katagori usia produktif, yaitu sebesar 79,53%. Banyaknya usia produktif di Kabupaten Sambas merupakan kondisi tersendiri bagi daerah tersebut karena banyak tersedia tenaga kerja produktif. Berdasarkan hasil analisis rata-rata laju pertumbuhan di Kecamatan Sajingan Besar adalah 2,33 persen, hal ini terjadi akibat dibukanya Kawasan Pos Lintas Batas dan Komersia Zone Aruk di Kecamatan tersebut. Sedangkan Kecamatan Sambas sebagai

ibu kota kabupaten menempati urutan ketiga yaitu sebesar 1.82 persen. Hal yang berbeda terjadi dengan Kecamatan Paloh yang hanya mengalami laju pertumbuhan penduduk sebanyak 0,98. Padahal Kecamatan Paloh juga merupakan salah satu PKSN karena berbatasan langsung secara darat dengan Malaysia.

Tabel 4.6  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sambas, 2014-2017

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk dalam persen (%)				Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	
Selakau	1.19	1.07	0.99	0.91	1.04
Selakau Timur	1.96	1.69	1.51	1.35	1.63
Pemangkat	0.76	0.73	0.71	0.65	0.71
Semparuk	1.18	1.07	1.00	0.95	1.05
Salatiga	0.82	0.78	0.75	0.66	0.75
Tebas	1.08	0.99	0.93	0.81	0.95
Tekarang	1.63	1.43	1.30	1.16	1.38
Sambas	2.03	1.75	1.56	1.94	1.82
Subah	0.46	0.49	0.51	0.48	0.49
Sebawi	1.42	1.26	1.16	1.03	1.22
Sajad	0.73	0.71	0.70	0.62	0.69
Jawai	0.49	0.52	0.54	0.47	0.51
Jawai Selatan	0.19	0.28	0.34	0.31	0.28
Teluk Keramat	0.46	0.50	0.52	0.45	0.48
Galing	0.59	0.59	0.60	0.65	0.61
Tangaran	2.84	2.40	2.11	1.86	2.30
Sejangkung	2.08	1.79	1.60	1.38	1.71
Sajingan Besar	2.86	2.41	2.11	1.92	2.33
Paloh	1.11	1.01	0.95	0.85	0.98

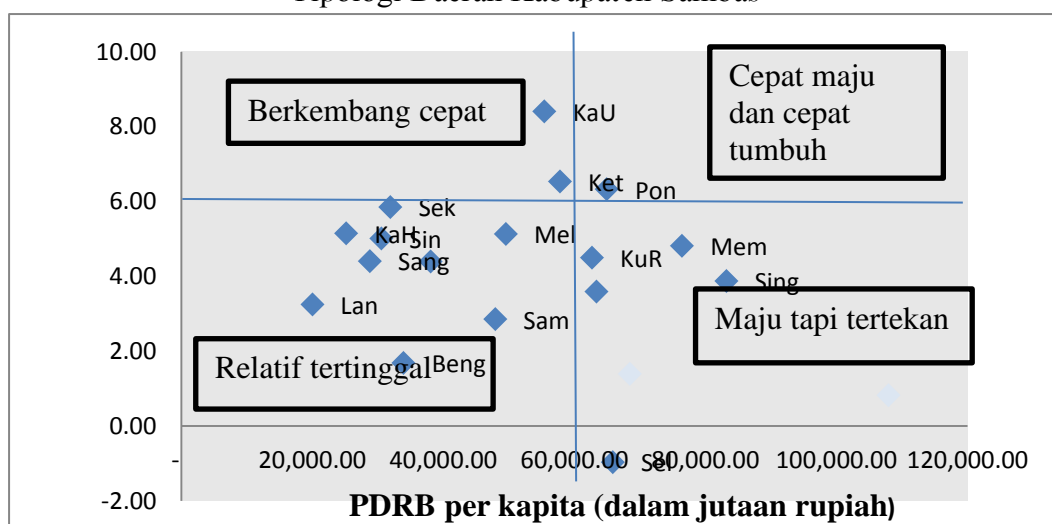
Sumber: Kabupaten Sambas dalam Angka, 2018, diolah

b) Tipologi ekonomi kawasan perbatasan.

Untuk mengetahui karakteristik dan posisi Kabupaten Sambas terhadap Provinsi Kalimantan Barat digunakan analisis tipologi daerah. Melalui tipologi daerah Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi empat klasifikasi (lihat Gambar ).

Gambar 4.7

Tipologi Daerah Kabupaten Sambas



Sumber: Kabupaten Sambas dalam Angka 2018, diolah

Ket:

Sam = Sambas                      KaH = Kapuas Hulu  
 Beng = Bengkayang              Sek = Sekadau  
 Lan = Landak                      Mel = Melawi  
 Mem = Mempawah                KaU = Kayong Utara  
 Sang = Sanggau                  KuR = Kubu Raya  
 Ket = Ketapang                  Pon = Pntianak  
 Sin = Sintang                      Sing = Singkawang

Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang masuk ke dalam *high growth and high income* adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuru Raya dan Kota Pontianak. Kemudian yang berada pada high income but low growth adalah Kota Singkawang. Kabupaten yang berada pada high growth and low income adalah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara. Terakhir yang termasuk low growth and low income adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas hulu dan Kabupaten Melawi. Diklasifikasikannya Kabupaten Sambas ke dalam daerah Low growth and low income, karena daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil yaitu 5,13 persen dari Provinsi Kalimantan Barat yaitu 5,17 persen, serta rata-rata pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Barat.

c) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Kabupaten Sambas

Peranan perekonomian suatu daerah terhadap wilayah yang lebih luas dapat diidentifikasi menggunakan parameter besaran kontribusi pendapatan daerah tersebut dalam konteks yang lebih luas. Dengan menghitung kontribusi PDRB Kabupaten Sambas terhadap Kalimantan Barat, dapat diketahui peranan perekonomian Kabupaten Sambas dalam mendukung perekonomian Kalimantan Barat.

Melalui angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam rentang waktu 4 tahun, tahun 2014-2017 peranan perekonomian Kabupaten Sambas terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan kecenderungan yang menurun walaupun tidak signifikan, penurunan persentasenya sangat kecil, hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 4.7

Kontribusi PDRB Kabupaten Sambas terhadap PDRB Kalimantan Barat, 2014-2017 Atas Harga Konstan 2010

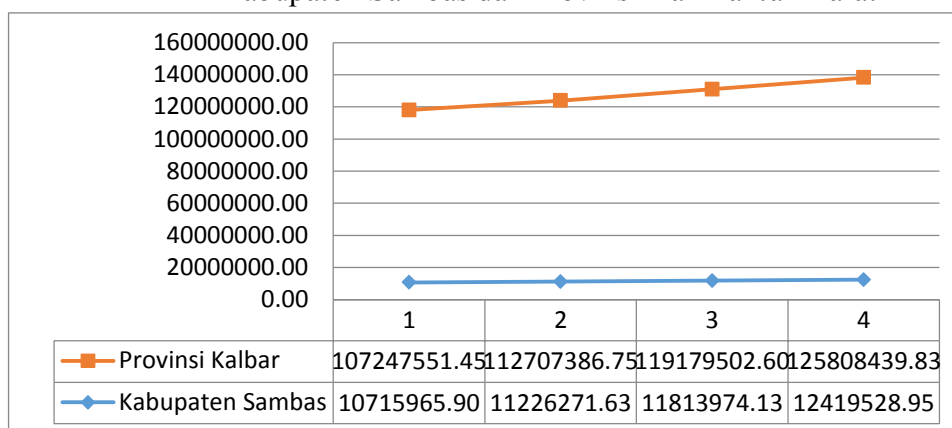
Uraian	Nilai				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Sambas	10.715.965,90	11.226.271,63	11.813.974.13	12.419.528,95	
Kalimantan Barat	107.247.551,45	112.707.386,75	119.179.502,60	125.808.439,83	

Kontribusi	9,99%	9,96%	9,91%	9,87%	9,93%
------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2018, diolah

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Kabupaten Sambas menyumbangkan kontribusi PDRB rata-rata pertahun sebesar 9,93 persen dalam mengembangkan kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat. Dapat disimpulkan bahwa peranan Kalimantan Barat dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Barat tergolong rendah. Perlu adanya pemberdayaan serta pengelolaan lebih lanjut terhadap potensi-potensi sumber daya lokal secara optimal, serta penguatan pengembangan ekonomi lokal untuk memacu dan meningkatkan daya perekonomian yang tentunya akan berdampak juga terhadap kondisi perekonomian provinsi. Potensi dalam pengembangan Kabupaten Sambas juga didukung lokasi Kabupaten Sambas yang letaknya strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Gambar 4.10  
PDRB Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2018, diolah

d) Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Analisis laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya pertumbuhan sektoral tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi (12,05 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (10,61 persen). Pertumbuhan sektoral terendah terletak pada sektor pertambangan dan penggalian (1,17 persen). Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kabupaten Sambas selama 2 tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi secara rata-rata sektoral mencapai 5,37 persen. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektoral, 2015-2017

No	Lapangan Usaha	2016	2017	rata-rata sektoral
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.71	5.37	5.04
2.	Pertambangan & penggalian	-0.50	2.85	1.17
3.	Industri pengolahan	4.50	4.50	4.50
4.	Penggunaan Listrik dan Gas	12.66	3.52	8.09

5.	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.39	6.26	8.33
6.	Konstruksi	5.19	5.03	5.11
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.45	4.31	4.38
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.80	4.72	3.76
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.79	5.38	6.58
10.	Informasi dan Komunikasi	10.25	13.85	12.05
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	13.71	7.50	10.61
12.	Real Estat	2.75	2.58	2.67
13.	Jasa Perusahaan	3.08	0.98	2.03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	7.16	3.94	5.55
15.	Jasa Pendidikan	5.98	2.12	4.05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.83	3.34	3.09
17.	Jasa Lainnya	4.31	4.17	4.24
Rata-rata LPE		6.00	4.73	5.37

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka, diolah

e) Sektor Basis Kabupaten Sambas.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, perlu dipacu sektor-sektor yang menjadi tumpuan Kabupaten Sambas. Sektor tersebut, di samping mampu dikembangkan juga akan memberikan dampak terhadap perkembangan sektor lainnya (lingkage effect), sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan diharapkan pula menjadi pemasok pendapatan daerah dengan diekspor ke luar daerahnya.

Oleh sebab itu, diperlukan informasi dan pemahaman terhadap sektor yang menjadi sektor unggulan. Sektor unggulan perlu diidentifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sektor. Untuk mengidentifikasi suatu sektor tergolong unggulan atau bukan, analisisnya tidak hanya didasarkan pada besar kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian, melainkan memerlukan beberapa pendekatan/analisis lain yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Suatu sektor unggulan tidak hanya memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian, tetapi memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dibandingkan sektor lain serta memiliki kinerja yang baik.

Ekonomi basis merupakan alat analisis untuk mengetahui sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Untuk mengetahui sektor yang berpengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah digunakanlah metode LQ (Location Quotient) yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9  
 Nilai LQ Setiap Sektor Usaha di Kabupaten Sambas, 2015-2017  
 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2017
----------------	------	------

*Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan  
Negara Indonesia Malaysia Di Sambas*

	Kab. Sambas	Prov. Kalbar	LQ	Kab. Sambas	Prov. Kalbar	LQ
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3841220.40	25571667.70	1.50	4238262.00	28335271.40	1.50
Pertambangan & penggalian	121702.50	4622382.70	0.26	124540.60	5675012.50	0.22
Industri pengolahan	1430108.10	18677203.60	0.77	1561684.00	20093405.60	0.78
Penggunaan Listrik dan Gas	5287.00	100393.10	0.53	6165.60	127933.40	0.48
Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	6541.50	160308.20	0.41	7673.50	175151.10	0.44
Konstruksi	847916.50	12817662.50	0.66	936784.30	14033227.20	0.67
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2012483.60	17161336.00	1.17	2192499.40	18516434.50	1.18
Transportasi dan Pergudangan	289928.00	4716831.10	0.61	312101.20	5237558.00	0.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	225216.40	2592128.00	0.87	255819.80	2808797.00	0.91
Informasi dan Komunikasi	525837.00	4903918.00	1.07	660007.90	6297482.70	1.05
Jasa Keuangan dan asuransi	297622.70	4060629.10	0.73	363818.60	4770803.20	0.76
Real Estat	388059.20	3350904.50	1.16	409052.60	3516275.80	1.16
Jasa Perusahaan	45508.00	552583.40	0.82	47368.70	577140.90	0.82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	440129.80	5423333.80	0.81	490253.30	6100735.50	0.80
Jasa Pendidikan	515210.10	4810077.10	1.07	557607.00	4961131.60	1.12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136268.20	1627155.50	0.84	144808.40	1737211.50	0.83
Jasa Lainnya	102232.70	1198240.80	0.85	111082.00	1325165.00	0.84
Jumlah	11231271.70	112346755.10		12419528.90	124288736.90	

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dan Angka 2018, diolah

Keterangan:

1. Nilai  $LQ < 1$  , berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain.
2. Nilai  $LQ = 1$ , berarti daerah yang bersangkutan mampu mencukupi daerah sendiri dalam kegiatan tertentu.
3. Nilai  $LQ > 1$ , berarti daerah yang bersangkutan mampu memenuhi pada sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis LQ di atas maka dapat disimpulkan sektor basis di Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, rektor real estat, serta sektor jasa pendidikan. Adapun yang termasuk sektor non basis adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor penggunaan listrik dan gas, sektor pengadaan air pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya.

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan metode LQ, diperoleh beberapa alternatif sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kemudian sektor kedua yang berpotensi menjadi sektor unggulan adalah sektor jasa pendidikan. Dengan nilai LQ yang relatif besar, maka kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dan mampu memenuhi pada sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain.

Melalui analisis di atas, maka secara umum terlihat bahwa sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, rektor real estat, serta sektor jasa pendidikan. Sektor lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor penggunaan listrik dan gas, sektor pengadaan air pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya cenderung kurang kompetitif dan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain, sehingga kurang dapat bersaing dengan wilayah di sekitarnya.

#### f) Kinerja sektor perekonomian Kabupaten Sambas

Melalui analisis shift share dalam penelitian ini dapat diketahui perbandingan laju pertumbuhan berbagai sektor di Kabupaten Sambas, yang merupakan kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia terhadap wilayah yang lebih tinggi jenjangnya yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Dengan analisis shift share ini juga dapat diketahui perkembangan tiap sektor dibandingkan sektor lainnya.



Tabel 4.10  
Hasil Pengolahan Shift Share, 2015-2017

Lapangan Usaha	Provinsi Kalimantan Barat		Kabupaten Sambas		Komponen			
	2015	2017	2015	2017	NS	PS	DS	PEK
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25571667.70	28335271.40	3841220.40	4238262.00	0.110	-	-0.005	0.103
Pertambangan & penggalian	4622382.70	5675012.50	121702.50	124540.60	0.110	0.118	-0.204	0.023
Industri pengolahan	18677203.60	20093405.60	1430108.10	1561684.00	0.110	-	0.016	0.092
Penggunaan Listik dan Gas	100393.10	127933.40	5287.00	6165.60	0.110	0.164	-0.108	0.166
Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	160308.20	175151.10	6541.50	7673.50	0.110	-	0.080	0.173
Konstruksi	12817662.50	14033227.20	847916.50	936784.30	0.110	-	0.010	0.105
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17161336.00	18516434.50	2012483.60	2192499.40	0.110	-	0.010	0.089
Transportasi dan Pergudangan	4716831.10	5237558.00	289928.00	312101.20	0.110	0.000	-0.034	0.076
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2592128.00	2808797.00	225216.40	255819.80	0.110	0.026	0.052	0.136
Informasi dan Komunikasi	4903918.00	6297482.70	525837.00	660007.90	0.110	0.174	-0.029	0.255
Jasa keuangan dan asuransi	4060629.10	4770803.20	297622.70	363818.60	0.110	0.065	0.048	0.222
Real Estat	3350904.50	3516275.80	388059.20	409052.60	0.110	-	0.005	0.054
Jasa Perusahaan	552583.40	577140.90	45508.00	47368.70	0.110	-	-0.004	0.041
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	5423333.80	6100735.50	440129.80	490253.30	0.110	0.015	-0.011	0.114
Jasa Pendidikan	4810077.10	4961131.60	515210.10	557607.00	0.110	-	0.051	0.082
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1627155.50	1737211.50	136268.20	144808.40	0.110	-	-0.005	0.063
Jasa Lainnya	1198240.80	1325165.00	102232.70	111082.00	0.110	-	-0.019	0.087
Jumlah	25571667.70	28335271.40	3841220.40	4238262.00				

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dan Angka 2018, diolah

Berdasarkan tabel dari hasil perhitungan analisis shift share untuk Kabupaten Sambas sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor real estat serta sektor jasa pendidikan dimungkinkan berpengaruh positif terhadap peningkatan dan perekonomian Kabupaten Sambas. Dalam upaya mengidentifikasi sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan, maka dapat diperoleh dengan mengkombinasikan komponen Propotional Share dan Differential Shift. Hasil analisis shift share:

1. Sektor unggulan adalah Jasa keuangan dan asuransi ;
2. Sektor agak unggul adalah sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estat, dan sektor jasa pendidikan;
3. Sektor agak mundur adalah sektor Pertambangan & penggalian, sektor Penguasaan Listik dan Gas, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib.
4. Sektor mundur adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Gambar 4.11  
Pengelompokan Sektor berdasarkan Analisis Shift Share, 2015-2017

		Propotional Share	
		Positif (+)	Negatif (-)
Differential Shift	Positif (+)	Sektor unggul: a. Jasa keuangan dan asuransi	Sektor agak unggul: 1. Industri pengolahan. 2. Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Konstruksi 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6. Real estat 7. Jasa Pendidikan
	Negatif (-)	Sektor agak mundur: 1. Pertambangan & penggalian 2. Penguasaan Listik dan Gas 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Informasi dan Komunikasi 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	Sektor mundur: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Jasa Perusahaan 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4. Jasa Lainnya

Sumber: Hasil analisis, 2018

g) Sektor prioritas

Melalui hasil perhitungan LQ dan shift share pada pembahasan sebelumnya, komponen pergeseran bersih (PB) yang didapatkan dari penjumlahan antara PS dan DS digabungkan dengan perhitungan LQ. Pada akhirnya sektor-sektor tersebut dapat diidentifikasi dalam empat kuadran yang bisa dilihat dalam gambar berikut.

Tabel 4.11  
 Nilai Pergeseran Bersih (PB) dan LQ Per Sektor di Kabupaten Sambas

Lapangan Usaha	Komponen		PB	Ket	LQ	Ket
	PS	DS				
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0.002	-0.005	-0.007	mundur	1.50	Basis
Pertambangan & penggalian	0.118	-0.204	-0.087	mundur	0.22	non basis
Industri pengolahan	-0.034	0.016	-0.018	mundur	0.78	non basis
Penggunaan Listrik dan Gas	0.164	-0.108	0.056	progresif	0.48	non basis
Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.017	0.080	0.063	progresif	0.44	non basis
Konstruksi	-0.015	0.010	-0.005	mundur	0.67	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.031	0.010	-0.021	mundur	1.18	Basis
Transportasi dan Pergudangan	0.000	-0.034	-0.034	mundur	0.60	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.026	0.052	0.026	progresif	0.91	non basis
Informasi dan Komunikasi	0.174	-0.029	0.145	progresif	1.05	Basis
Jasa keuangan dan asuransi	0.065	0.048	0.112	progresif	0.76	non basis
Real Estat	-0.061	0.005	-0.056	mundur	1.16	Basis
Jasa Perusahaan	-0.066	-0.004	-0.069	mundur	0.82	non basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	0.015	-0.011	0.004	progresif	0.80	non basis
Jasa Pendidikan	-0.079	0.051	-0.028	mundur	1.12	Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.042	-0.005	-0.047	mundur	0.83	non basis
Jasa Lainnya	-0.004	-0.019	-0.023	mundur	0.84	non basis

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam angka 2018, diolah

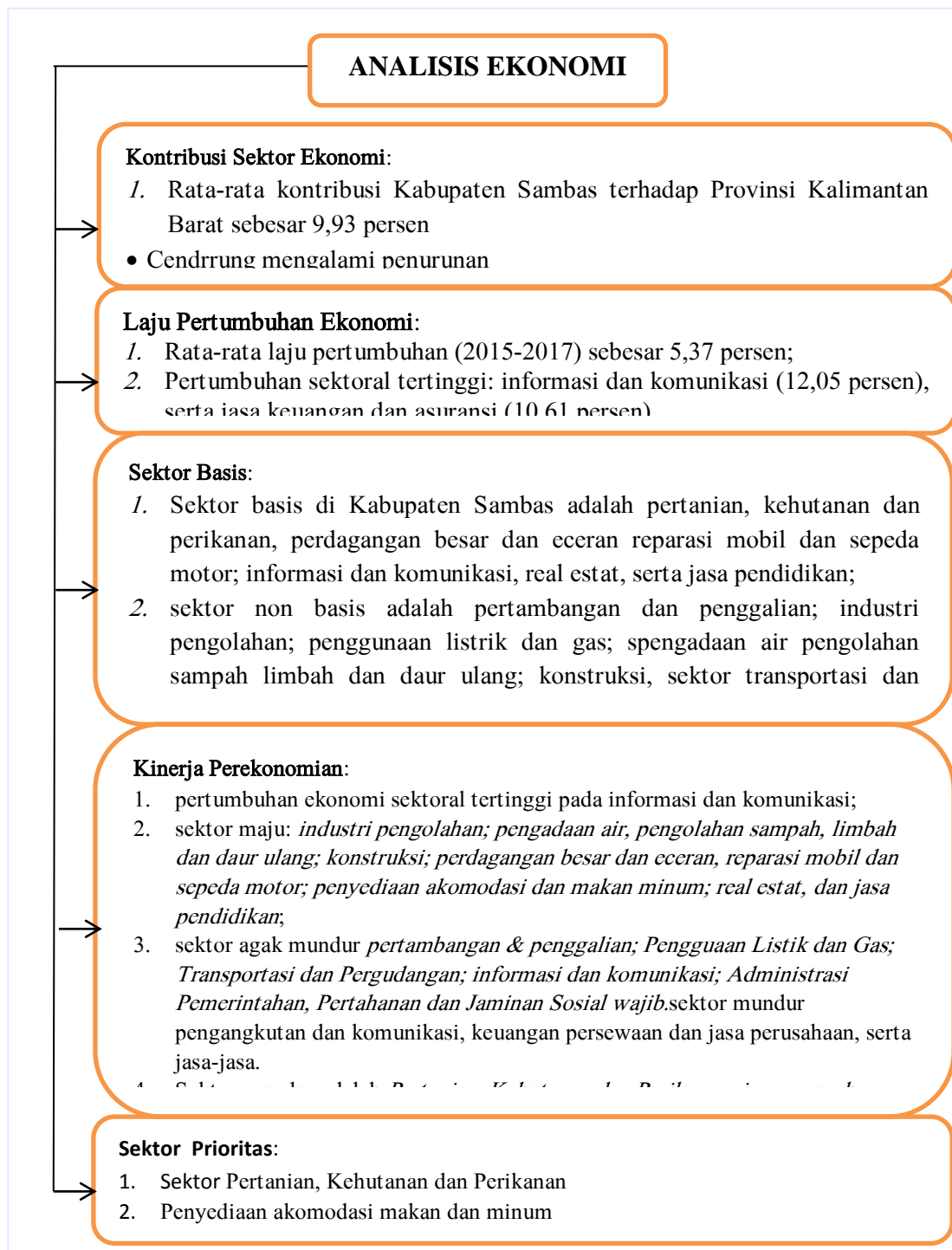
Berdasarkan hasil LQ dan shift share sektor unggulan Kabupaten Sambas adalah sektor informasi dan komunikasi. Hal ini karena pesatnya berkembang pesatnya perkembangan penggunaan fasilitas berbasis teknologi di Kabupaten Sambas. Sedangkan sektor potensial di Kabupaten Sambas diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan sumbangan tertinggi berasal dari sub sektor

pertanian. Maka sebaiknya pengembangan sektor lapangan usaha dikonsentrasikan pada sektor pertanian, terutama sub sektor perkebunan yang diharapkan menjadi produk unggulan wilayah ini, sehingga pada akhirnya dapat menunjang perkembangan sektor lain, terutama industri pengolahan di mana pengembangan industri pengolahan merupakan salah satu wacana dari pengembangan kawasan perbatasan neraga yang berpusat di Kecamatan Sajingan, yaitu Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk. Salah satu sektor berkembang yang harus diperhatikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, hal ini karena sudah dibukanya Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk, sehingga jalan utama di sepanjang Kabupaten Sambas sudah menjadi pusat lalu lalang kendaraan, baik dari domestik maupun mancanegara.

Gambar 4.12  
Identifikasi Sektor Prioritas di Kabupaten Sambas

Sektor prioritas 3/berkembang: 1. Pengguaan Listik dan Gas; 2. Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang; 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4. Jasa keuangan dan asuransi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	PB>0 Sektor prioritas 1/unggulan: 1. Informasi dan Komunikasi
LQ<1 Sektor prioritas 4/terbelakang: 1. Pertambangan dan penggalian 2. Industri pengolahan 3. Konstruksi 4. Transportasi dan Pergudangan 5. Jasa perusahaan 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7. Jasa lainnya	LQ>11 Sektor prioritas 2/potensial: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor jasa-jasa. 3. Real estat
PB<0	

Gambar 4.13  
Ringkasan Hasil Analisis Ekonomi Kabupaten Sambas



Sumber: Hasil analisis, 2018

## V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ekonomi Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Sambas yang sedemikian pesatnya hakikatnya belum mampu mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tipologi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas adalah merupakan daerah relatif tertinggal (low growth and low income), yang memiliki rata-rata pertumbuhan

ekonomi lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, dengan rata-rata kontribusi sektoral hanya 5,37 persen. Adapun yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan salah satu sektor berkembang yang harus diperhatikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia . Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 Jakarta: BNPP,2011.
- Husnadi, “Menuju Model Pengembangan kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten sambas, Kalimantan Barat)” Tesis Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponogoro, 2006.
- Kuncoro, Mudrajat. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPPT STIM YKPN, 2010.
- Kurniadi, Dedi. “Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikon Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”. Tesis. (Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro., 2009.
- Pemerintah Kabupaten Sambas, Kebijakan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas. Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas, 2016.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. “Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan”, Walisongo 21, No. 2 2013.
- Purnamasari, Wulan, “Analisis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Studi: Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk)” Tesis Yogyakarta: Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu-Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang: Penataan ruang, Pasal 10 ayat 3.
- Tarigan, R. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tirtosudarmo, Riwanto, “Kalimantan Barat sebagai ‘Daerah Perbatasan’: Sebuah Tinjauan Demografi-Politik”. *Antopologi Indonesia* No. 67 Tahun 2008.